



**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Desember 2024/Khusus - Akhir Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIT KERJA : UNIVERSITAS MULAWARMAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **RUDIANTO AMIRTA**
2. Jabatan : **DEKAN**
3. NHK : **682170**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 1.135.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 327 m2/120 m2 di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
2. Tanah Seluas 400 m2 di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
3. Tanah Seluas 150 m2 di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000
4. Tanah Seluas 150 m2 di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000
5. Tanah Seluas 400 m2 di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 191.000.000**

1. MOBIL, DAIHATSU TERIOS Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
2. MOBIL, TOYOTA AGYA Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 85.000.000
3. MOTOR, HONDA SOLO - SPACY Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 19.950.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp. ---**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp. 237.654.542**



F. HARTA LAINNYA

Sub Total

Rp. ----

Rp. 1.583.604.542

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.583.604.542

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.